

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia Jilid 1*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2004.
- Agung Raharjo, *Pendaftaran Konversi Tanah Hak Milik Adat oleh Ahli Waris*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Andrian Sutendi. *Peralihan hak-hak atas tanah dan pendaftarannya*. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- AP. Parlindungan, *Konversi Hak-Hak Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- _____, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Arie S. Hutagalung, *Bahan Kuliah Hukum Agraria*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2002.
- _____, *Serba Aneka Masalah Tanah dalam Kegiatan Ekonomi (suatu kumpulan karangan)*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 1999.
- _____, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, Pustaka Margaretha, Jakarta, 2012.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya) Jilid 2*, Djambatan, Jakarta, 2008.
- Effendy Hasibuan, *“Dampak Pelaksanaan Eksekusi Hipotik Dan Hak Tanggungan Terhadap Pencairan Kredit Macet Pada Perbankan Di Jakarta*, Laporan Penelitian, Universitas Indonesia Pascasarjana (S3) Bidang Studi Ilmu Hukum, 1997.

- Effendi Perangin, *Praktek Penggunaan Tanah Sebagai Jaminan Kredit*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Erman Rajagukguk, *Hukum Agraria, Pola Penguasaan Tanah Daerah Kebutuhan Hidup*, Chandra Pratama, Jakarta, 1995.
- Erna Sri Wibawanti dan R.Murjiyanto, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty Yogyakarta, 2013.
- E.Utrecht/Moh.Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Cetakan Kesebelas, Jakarta, 1989.
- Fitriani Jamal. *Pengantar Hukum Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011.
- Florianus, S.P Sangsun, *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, Visi Media, Jakarta, 2008.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan, Hak Tanggungan, Buku 2*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Permasalahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekretaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010.
- Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988.
- Mudjiono, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan*, Jurnal Hukum No. 3 Vol.14 Juli 2007.
- Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
- Ramli Zein, *Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Ronny Hanitilijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 1990.

Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Sudaryanto. W, “*Pokok-Pokok Kebijakan Undang-Undang Hak Tanggungan*”, Seminar Nasional UUHT, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 1996.

Supriadi, *Hukum Agrarian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)*, Alumni, Bandung, 1999.

Sutarno, *Aspek – Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, CV. Alfabeta, Bandung, 2004.

Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *UUD’45 dan amandemennya*, FOKUS MEDIA, Bandung, 2004.

Yamin lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Maju*, Bandung, 2008.

B. Sumber Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok –Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Surat Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110-1039 Tanggal 18 April 1996.

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996 Tentang Bentuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan Dan Sertifikat Hak Tanggungan.

Surat Penyampaian Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pendaftaran Hak Tanggungan.

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pendaftaran Hak Tanggungan.

Undang Undang Tentang Penetapan Undang Undang Darurat Tentang Pemindahan Hak Atas Tanah Dan Barang – Barang Tetap Yang Lainnya Yang Bertakluk Kepada Hukum Eropa (Undang – Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1952) Sebagai Undang Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

C. Sumber Lain

Putusan

Putusan Nomor 25/Pdt/2015/PT.BDG.

Internet

<http://damsikyanjui.blogspot.co.id/2010/03/tanah-dan-fungsinya-bagi-manusia.html> diakses pada tanggal 3 maret 2017.

<http://politikagraria.blogspot.co.id/2013/05/sejarah-hukum-agraria-sebelum.html> diakses pada tanggal 3 maret 2017.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1583/1/perda-syamsul1> diakses pada tanggal 4 maret 2017 .

www.gultomlawsconsultans.com/Dokumen-Dokumen-yang-dapat-menjadi-Alat-Bukti-Penguasaan-atas-Tanah. Diakses pada 23 Februari 2017.